

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan perkembangan akuntansi sektor publik yang pesat dimulai dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.² Otonomi daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan adanya otonomi daerah adalah mempercepat jumlah dan kualitas pelayanan umum dalam berbagai sektor, meningkatkan kesejahteraan daerah, dan daya saing daerah yang cukup kuat. Salah satu meningkatkan kualitas pelayanan umum di sektor publik yang diharapkan mampu menarik investor berinvestasi pada daerah otonom.³

Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan wewenang fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Tujuan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, diharapkan pemerintah daerah menjadi lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan dan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah Anggaran Pendapatan dan

² Puput Puspita Sari, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 3

³ Alfina Fadhila Soesilo dan Nur Fadjrih Asyik, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Provinsi, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 10, No. 4, 2021, hlm. 2

Belanja Daerah (APBD) memiliki peran penting pada pemerintah daerah, salah satu dokumen rencana kinerja aspek finansial, yang anggaran digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan pengembangan daerah.⁴ Tujuan penyusunan APBD sebagai keselarasan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, pengalokasian secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah.

Laporan APBD digunakan sebagai tolak ukur dalam proses pembangunan daerah. Pemerintah daerah wajib melaporkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam menjalankan roda pemerintahannya kepada masyarakat guna tercapai transparansi, sehingga masyarakat dapat menilai bagaimana kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Kinerja keuangan merupakan alat ukur digunakan dalam melihat kinerja keuangan daerah. Analisis kinerja keuangan digunakan sebagai identifikasi alur keuangan pemerintah daerah berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerahnya. Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan mengingat pengaruhnya sangat besar terhadap sektor publik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah yaitu ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, ukuran legislatif, dan *leverage*.⁵ Pada penelitian ini faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah.

⁴ Mentari Kurnia Dharmawati dan Ririn Irmadariyani, "Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi", *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 2016, hal 1-2, diakses 30 September 2024

⁵ Ni Made Diah Permata Sari dan I Ketut Mustanda, "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah" *E-Jurnal Manajemen*, Vol. 8, No. 8, 2019, hlm.4762

Dana Perimbangan merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.⁶ Dana Perimbangan dibagi menjadi tiga, yaitu: dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.⁷

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, bertujuan dalam memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah⁸. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.⁹ Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.¹⁰

Bukan hanya Pendapatan Asli Daerah, belanja daerah juga mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah karena berkaitan pada kualitas pelayanan

⁶ Dwi Saraswati, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai Variabel Pemoderasi pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara”, *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, Vol. 8, No. 1, 2017, hlm. 45

⁷ Sealys Harie Saputri, “Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 4

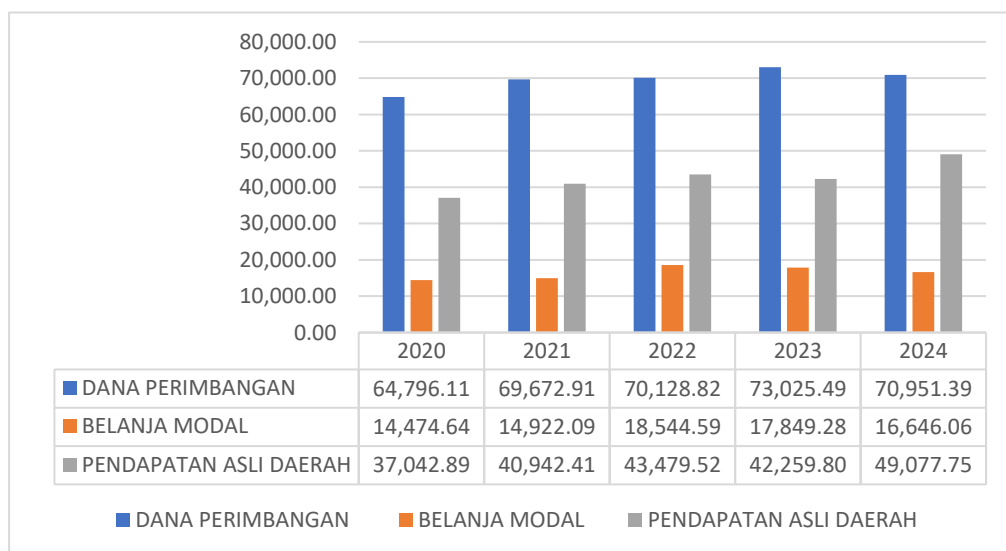
⁸ Lestari Adhi Widyowati, “Dampak Covid-19 terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Pemerintah Kota Tangerang Selatan”, *Review of Applied Accounting Research*, Vol. 2, No. 1, 2022 hlm. 60

⁹ Putri Aisyah Ayuningtika dan Ontot Murwanto, “Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Sebelum dan Pada Saat Covid-19”, *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, Vol.2, No.1, 2023, hlm. 97

¹⁰ Dwi Putri Ayu Setyoningrum, “Menakar Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kota Batu di Masa Pandemi” *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol.6, No.2S, 2022, hlm. 3

publik yang diberikan kepada masyarakat. Belanja daerah dibedakan menjadi belanja modal dan belanja berulang pada layanan komunitas sosial, pengeluaran dalam administrasi dan pengeluaran pelayanan ekonomi. Hasil pencapaian dalam belanja daerah yaitu dengan pembangunan infrastruktur berupa fasilitas umum. Pembangunan infrastruktur yang pesat suatu daerah, mampu mendorong kegiatan investasi pada daerah tersebut, hal ini berdampak pada pertumbuhan pendapatan daerah pada masa mendatang, perekonomian daerah yang semakin berkembang, dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.¹¹ Dibawah ini merupakan gambar Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Provinsi Jawa Timur.

Gambar 1. 1
Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan
Jawa Timur Tahun 2020-2024 (miliar)



Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)¹²

¹¹ Hasna Lathifa dan Haryanto, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017”, *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 2

¹² DJPK. Kemenkeu.go.id, Diakses pada tanggal 09 Oktober 2024 Pukul 20.26

Berdasarkan gambar 1.1 diatas diketahui bahwa realisasi pada Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur mengalami naik turun pada setiap tahunnya. Hal ini juga diketahui pada Realisasi Pendapatan APBD se-Jatim s.d 31 Mei 2024 sebesar 38,60%. Sedangkan pada Realisasi Belanja APBD se-Jatim s.d 31 Mei 2024 sebesar 24,91%. Untuk Dana Perimbangan sendiri se-Jatim s.d 31 Oktober 2024 terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar 29,04%, Dana Alokasi Umum sebesar 15,63%, serta Dana Alokasi Khusus fisik sebesar 18,37% dan Dana Alokasi Khusus non fisik sebesar 0,92%.¹³

Adanya kinerja keuangan pemerintah dapat mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah menggali potensi-potensi yang dimiliki daerah, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya.¹⁴ Kinerja keuangan juga salah satu ukuran pencapaian pada aspek keuangan termasuk pendapatan dan belanja daerah, maka kinerja keuangan dapat dilihat dari kenaikan pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja daerah.¹⁵ Dalam hal tersebut, pemerintah daerah perlu menghitung seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima sehingga dapat diketahui kegiatan tersebut efisiensi tidaknya pada kinerja keuangan.

Menurut hasil penelitian terdahulu, pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

¹³ Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, “Press Release APBN Regional Jawa Timur s.d. 31 Mei 2024”<https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/jatim/id/data-publikasi/press-release/2995-press-release-apbn-regional-jawa-timur-s-d-31-mei-2024>, diakses 28 Mei 2025.

¹⁴ Hasna Lathifa dan Haryanto, “Pengaruh Pendapatan Asli...”, hlm. 2

¹⁵ Ibid., hlm. 7

Provinsi Bali Tahun 2011-2015, pada Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015 dan Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015.¹⁶

Pada penelitian lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2007-2013.¹⁷ Penelitian lain, Pendapatan Asli Daerah pada kinerja keuangan berpengaruh positif yang signifikan, Dana Perimbangan memiliki hubungan positif yang signifikan dengan variabel independen Kinerja Keuangan, dan Belanja Modal memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan.¹⁸

Penelitian terdahulu selanjutnya, Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Halmahera Barat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Halmahera Barat. belanja modal Kabupaten Halmahera Barat berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.¹⁹

Penelitian lain, menunjukkan hasil, ada pengaruh yang negatif dan signifikan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010 –

¹⁶ Ni Putu Gina Sukma Antari dan Ida Bagus Panji Sedana, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”, *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 1102-1104

¹⁷ Hasna Lathifa dan Haryanto, “Pengaruh Pendapatan Asli...”, hlm. 7

¹⁸ Afia Maulina dkk, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”, *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, Vol. 5 No.2, 2021, hlm. 397

¹⁹ Yuliasti Leki dkk, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 18 No. 5, 2018, hlm. 172

2013, pada pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2013 pengaruh yang positif dan signifikan, untuk pendapatan asli daerah memoderasi pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010 - 2013, terbukti kebenarannya.²⁰

Hasil penelitian terdahulu, menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, menjadi ketertarikan peneliti meneliti kembali mengenai Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel moderasi pada Kabupaten/Kota Wilayah Jawa Timur.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil yang didapat oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dan diindikasikan adanya research gap, membuat tertarik untuk diteliti kembali mengenai Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel moderating,

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki Kabupaten/Kota sebanyak 38 wilayah yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten, Bojonegoro Kabupaten, Bondowoso Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan,

²⁰ Tungki Ariwibowo, "Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Moderasi", *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, Vol. 11, 2015, hlm. 343

Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, dan Kota Batu. Daerah yang pemerintahannya mempunyai pertumbuhan ekonomi fluktuasi dengan banyaknya potensi daerah yang dimiliki, sehingga memerlukan pengelolaan keuangan yang tepat baik pada pendapatan daerah maupun belanja daerah.²¹

Ketertarikan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah berperan sangat penting dalam terlaksananya pembangunan daerah. Dengan adanya segala potensi wilayah yang dimiliki Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Timur dengan diikuti perkembangan dalam mengelolanya akan memberikan wujud hasil positif dari adanya otonomi daerah. Hasil itu berupa kemampuan dalam mengelola keuangan daerahnya dengan baik, efektif dan efisien. Dengan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur secara optimal akan memberikan peluang lebih terhadap besarnya perolehan yang didapatkan sehingga tidak tergantung pada pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam tentang **“Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

²¹ Linawati dkk, “Alokasi Belanja Modal Sebagai Pemoderasi Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Kediri”, *Majalah Ekonomi*, Vol. 23 No. 1, 2018, hlm 72

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Moderating”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan latar belakang permasalahan yang menunjukkan bahwa, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi, ketidakkonsistenan peneliti dahulu, serta jarangya tentang Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Moderasi juga menjadi dasar dalam penelitian ini.

2. Batasan Penelitian

Agar peneliti lebih terarah serta tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dibahas, maka peneliti menetapkan batasan penelitian yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur
- b. Penelitian ini berfokus pada variabel bebas (X) yang meliputi Dana Perimbangan (X1) dan Belanja Modal (X2), variabel terikat (Y) yaitu Kinerja Keuangan, dan variabel moderating (Z) yaitu Pendapatan Asli Daerah
- c. Data yang diambil berasal dari laporan keuangan tahunan selama 3 tahun yaitu tahun 2022-2024

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Timur Tahun 2022-2024?
2. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Timur Tahun 2022-2024?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Timur Tahun 2022-2024?
4. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Timur Tahun 2022-2024?
5. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Timur Tahun 2022-2024?
6. Apakah Pendapatan Asli Daerah memoderasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada pada Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Timur Tahun 2022-2024?
7. Apakah Pendapatan Asli Daerah memoderasi pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Timur Tahun 2022-2024?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisis Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Timur Tahun 2022-2024
2. Untuk Menganalisis Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Timur Tahun 2022-2024.
3. Untuk Menganalisis Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Timur Tahun 2022-2024.
4. Untuk Menganalisis Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Timur Tahun 2022-2024
5. Untuk Menganalisis Belanja Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Timur Tahun 2022-2024
6. Untuk Menganalisis Pendapatan Asli Daerah memoderasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Timur Tahun 2022-2024
7. Untuk Menganalisis Pendapatan Asli Daerah memoderasi pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Timur Tahun 2022-2024

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teori dalam pengembangan teoritis maupun praktis yang berkaitan dalam memecahkan masalah secara aktual. Berikut ini manfaat dari penelitian:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan pada bidang Akuntansi Sektor Publik yang berkaitan dengan Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Institusi

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi sebagai bahan pengevaluasian serta pertimbangan dan masukan atas pengambilan keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah

b. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini bisa menambah pemahaman, pengetahuan, wawasan yang mana bisa dipakai sebagai pengembangan keilmuan serta sebagai bentuk sumbangsih pada perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk dijadikan referensi bagi mahasiswa khususnya pada program studi akuntansi syariah.

c. Bagi Pihak Lain

Diharapkan hasil penelitian dikembangkan lebih lanjut atau dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam kajian yang berbeda sehingga dapat memperluas cakupan penelitian.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas tentang “Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Moderasi pada Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Timur” sehingga dalam penelitian ini berkaitan dengan variabel penelitian yang terdiri dari variabel independen (X), variabel dependen (Y), dan variabel moderasi (Z).

Pengaruh “Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Timur pada Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Moderating” sehingga dalam penelitian ini berkaitan dengan variabel penelitian yang terdiri dari variabel independen (X), variabel dependen (Y), variabel moderating (Z). Variabel independen atau variabel bebas pada penelitian ini yaitu Dana Perimbangan (X1), Belanja Modal (X2). Sedangkan Variabel dependen atau variabel terikat pada penelitian ini yaitu Kinerja Keuangan (Y). Untuk variabel moderating (Z) yaitu Pendapatan Asli Daerah.

G. Penegasan Variabel

Penegasan variabel dari judul penelitian ini bertujuan agar tidak ada kerancuan, kesalahpahaman atau perbedaan pemahaman pembaca. Diharapkan bagi pembaca mampu memahami baik secara konseptual dan operasional. Definisi konsep dan definisi operasional dijabarkan dalam penjelasan berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan diartikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

b. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum.

c. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019 menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan daerah

d. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja (*Performance*)

dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan.

2. Definisi Operasional

Secara operasional peneliti memiliki maksud untuk menguji pengaruh dari Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Timur dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Moderating. Data yang dihasilkan berasal dari data sekunder. Setelah data terkumpul kemudian diuji dengan uji statistik. Selanjutnya akan diketahui seberapa besar pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Timur dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Moderating tahun 2022-2024

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini ditujukan untuk mempermudah dan memberikan alur kajian atau pembahasan yang harus dilakukan oleh peneliti. Adapun sistematika penyusunan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

1. Bagian Awal

Terdiri dari (a) halaman sampul depan, (b) halaman judul, (c) lembar persetujuan pembimbing, (d) lembar pengesahan penguji, (e) pernyataan keaslian, (f) motto, (g) halaman persembahan, (h) kata pengantar, (i) daftar isi) daftar tabel, (k) daftar gambar, (l) daftar lampiran, (m) transliterasi, dan (n) abstrak.

2. Bagian Utama

Sistematika penulisan penelitian ini mencakup 6 (enam) bab, memiliki sub bab yang memberikan penjelasan secara jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas supaya mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini sebagai berikut

a. Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini dibahas mengenai subbab pendahuluan meliputi: (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah dan batasan penelitian, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup penelitian, (g) penegasan variabel, (h) sistematika penulisan

b. Bab II: Landasan Teori

Pada bab ini dibahas mengenai subbab landasan teori meliputi: a) teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, (b) teori yang membahas variabel/sub variabel kedua, (c) kajian penelitian terdahulu, (e) kerangka konseptual, dan (f) hipotesis penelitian.

c. Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini dibahas mengenai subbab metode penelitian (a) berisi pendekatan dan jenis penelitian; (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, (e) analisis data,

d. Bab IV: Hasil Penelitian

Pada bab ini dibahas mengenai subbab hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi data dan hasil analisis data.

e. Bab V: Pembahasan

Pada bab ini berisi pembahasan hasil dari penelitian dengan mencocokkan teori-teori dan hasil uji statistik apakah terdapat pengaruh pada tiap variabel penelitian.

f. Bab VI: Penutup

Pada bab ini membahas kesimpulan terkait dengan hasil pembahasan serta saran berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan kepada pihak yang berkepentingan

3. Bagian Akhir

merupakan bagian akhir yang memuat tentang (a) daftar rujukan, (b) lampiran, dan (c) daftar riwayat hidup.